



## Jurnal Riset & Pengembangan Ekonomi Islam

Available at <https://jurnal.staihwiduri.ac.id/index.php/finest/index>

### Rekonstruksi Konsep *Three Zeros* Muhammad Yunus dalam Pengentasan Kemiskinan Era *Artificial Intelligence*: Perspektif Ekonomi Islam

#### *Reconstruction of Muhammad Yunus Three Zeros Concept in Poverty Alleviation in the Artificial Intelligence Era: An Islamic Economic Perspective*

Adhya Hafsari Kusuma Wardhani<sup>1\*</sup>, Hafiza Farra Azzahra<sup>2</sup>, Agus Waluyo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, Indonesia

Email: [adhyahafsarikusumawardhani@gmail.com](mailto:adhyahafsarikusumawardhani@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [hafizafarra87@gmail.com](mailto:hafizafarra87@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[aguswaluyo@uinsalatiga.ac.id](mailto:aguswaluyo@uinsalatiga.ac.id)<sup>3</sup>

#### Article Info

Article History:

Received: 24-6-2026

Accepted: 24-6-2026

Published: 25-6-2026

#### Abstrak

Perkembangan pesat Kecerdasan Buatan (AI) telah menciptakan paradoks dalam sistem ekonomi kontemporer. Meskipun AI secara signifikan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, secara bersamaan juga meningkatkan risiko pengangguran struktural, ketidaksetaraan digital, dan bentuk-bentuk kemiskinan baru. Studi-studi sebelumnya telah banyak membahas kerangka *Three Zeros* Muhammad Yunus dan instrumen ekonomi Islam secara terpisah. Namun, studi yang mengeksplorasi integrasi konseptual keduanya dalam mengatasi tantangan kemiskinan di era AI masih terbatas. Studi ini bertujuan untuk menguji relevansi konsep *Three Zeros* Muhammad Yunus Kemiskinan, Pengangguran, dan Emisi Karbon Bersih dalam pengentasan kemiskinan dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian konseptual dan pustaka. Data dikumpulkan melalui seleksi literatur dari buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademis kontemporer yang berkaitan dengan bisnis sosial, keuangan sosial Islam, transformasi digital, dan disrupsi ekonomi berbasis AI. Analisis data dilakukan melalui analisis konten kualitatif dan interpretasi kritis. Temuan menunjukkan bahwa kerangka *Three Zeros* secara konseptual selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya keadilan distributif, Jihad Ikhtisadi, dan Khilafah-Amanah. Lebih lanjut, mengintegrasikan bisnis sosial dengan instrumen keuangan sosial Islam, khususnya Ziswaf digital dan pembiayaan mikro syariah, menawarkan kerangka kerja alternatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mengurangi ketidaksetaraan di tengah disrupsi teknologi. Studi ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas penerapan kerangka *Three Zeros* ke dalam wacana ekonomi Islam dan memberikan implikasi praktis untuk mengembangkan kebijakan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di era AI.

**Kata Kunci:** *Three Zeros*, Kecerdasan Buatan, Ekonomi Islam, Pengentasan Kemiskinan, Keuangan Sosial Islam

**Abstract**

*The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has created a paradox in the contemporary economic system. While AI significantly improves productivity and efficiency, it simultaneously increases the risk of structural unemployment, digital inequality, and new forms of poverty. Previous studies have widely discussed Muhammad Yunus's Three Zeros framework and Islamic economic instruments separately. However, limited studies have explored their conceptual integration in addressing poverty challenges in the AI era. This study aims to examine the relevance of Muhammad Yunus's Three Zeros concept Zero Poverty, Zero Unemployment, and Zero Net Carbon Emissions in poverty alleviation from the perspective of Islamic economics. This research employs a qualitative approach using conceptual and library research methods. Data were collected through literature selection from books, scientific journals, and contemporary academic publications related to social business, Islamic social finance, digital transformation, and AI-based economic disruption. Data analysis was conducted through qualitative content analysis and critical interpretation. The findings indicate that the Three Zeros framework conceptually aligns with Islamic economic principles, particularly distributive justice, Jihad Ikhtisadi, and Khilafah-Amanah. Furthermore, integrating social business with Islamic social finance instruments especially digital Ziswaf and sharia microfinance offers an alternative framework for strengthening economic resilience and reducing inequality amid technological disruption. This study contributes theoretically by extending the application of the Three Zeros framework into Islamic economics discourse and provides practical implications for developing inclusive and sustainable economic policies in the AI era.*

**Keywords:** *Three Zeros, Artificial Intelligence, Islamic Economics, Poverty Alleviation, Islamic Social Finance*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi di era modern tengah berada di titik kulminasi yang luar biasa seiring dengan hadirnya kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)*. Teknologi AI tidak lagi sekadar menjadi alat bantu efisiensi, melainkan telah memicu disrupsi fundamental pada struktur ekonomi global. Di satu sisi, AI menawarkan lompatan produktivitas yang masif. Namun di sisi lain, fenomena otomatisasi ini membawa ancaman nyata berupa pergeseran tenaga kerja manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administratif, berulang, bahkan teknis menengah kini mulai digantikan oleh algoritma pintar. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, realitas ini menjadi alarm bahaya karena berpotensi memperlebar jurang *digital divide*, memicu ledakan angka pengangguran baru (*unemployment outbreak*), dan pada akhirnya bermuara pada kemiskinan sistemik yang lebih kompleks. Kemiskinan adalah fenomena yang begitu mudah dijumpai di mana-mana. Tak hanya di pedesaan, tetapi juga di perkotaan.

Sistem ekonomi kapitalisme yang mendominasi dunia saat ini cenderung memperparah dampak negatif disrupsi tersebut. Dalam arsitektur tekno-kapitalisme, kepemilikan teknologi canggih dan modal berputar secara eksklusif di segelintir elite

korporasi. Alih-alih mendistribusikan kemakmuran, otomatisasi berbasis AI berisiko menjadi mesin baru pemusatan kekayaan yang meminggirkan masyarakat marginal dari akses mata pecaharian formal. Karakteristik bisnis yang murni mengejar profit materi (*profit-maximization*) terbukti gagap dalam menjawab krisis sosial-ekologis yang timbul akibat transisi teknologi ini. Maka dari itu, diperlukan sebuah rekonstruksi paradigma ekonomi alternatif yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, melainkan menempatkan manusia dan keberlanjutan sebagai pusat dari Pembangunan.

Selain itu, percepatan otomatisasi berbasis AI juga memunculkan persoalan etika ekonomi yang cukup kompleks. Efisiensi produksi yang meningkat memang dapat memperbesar keuntungan korporasi, akan tetapi di sisi lain mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia secara signifikan. Fenomena ini memperlihatkan adanya paradoks Pembangunan modern, yaitu ketika kemajuan teknologi justru berpotensi mempersempit kesempatan ekonomi masyarakat luas. Oleh sebab itu, muncul kebutuhan mendesak untuk membangun sistem ekonomi alternatif yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial, distribusi kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan (Yunus, 2017).

Di tengah urgensi tersebut, pemikiran Muhammad Yunus, seorang ekonom peraih Nobel Perdamaian asal Bangladesh, menawarkan sebuah peta jalan kontemporer yang relevan melalui visi *Three Zeros*. Visi ini mencakup tiga target utama yang saling berwawasan ekonomi dan ekologis, yaitu: *Zero Poverty*, *Zero Unemployment*, dan *Zero Net Carbon Emission*. Gagasan Yunus yang bertumpu pada pengembangan *Social Business* (bisnis sosial), di mana modal diinvestasikan murni untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan tanpa pembagian dividen pribadi, menjadi tesis tandingan yang kuat terhadap keserakahan kapitalisme global. Yunus memandang bahwa esensi manusia adalah seorang wirausahawan (pencipta kerja) dan teknologi seharusnya diarahkan untuk memperkuat kemandirian komunitas lokal, bukan untuk menyingkirkan eksistensi mereka dari roda perekonomian (Yunus, 2017).

Bagi Ekonomi Islam, visi *Three Zeros* yang digagas oleh Muhammad Yunus memiliki kesesuaian dengan prinsip keadilan distributif, *Jihad Ikhtisadi*, dan *Khilafah-Amanah*. Dari ketiga prinsip tersebut menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, dorongan untuk membangun kemandirian ekonomi, serta tanggung jawab manusia dalam menjaga keberlanjutan bumi. Berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada relevansi konsep *Three Zeros* yang digagas oleh Muhammad Yunus dalam perspektif ekonomi Islam. Meskipun visi *Three Zeros* sangat kaya akan nilai kemanusiaan, penerapannya di era disrupsi digital saat ini memerlukan kajian yang lebih kontekstual, khususnya jika ditinjau dari instrumen praktis keuangan sosial Islam modern. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan telaah terhadap pemikiran ekonomi Muhammad Yunus dalam konteks pengentasan kemiskinan di era AI. Melalui perspektif Ekonomi Islam, artikel ini akan membedah bagaimana visi *Three Zeros* dapat diintegrasikan dengan instrumen keuangan sosial Islam, seperti optimalisasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

(Ziswaf) digital serta Lembaga pembiayaan mikro syariah, sebagai benteng pertahanan ekonomi umat dalam menghadapi tantangan otomatisasi global.

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah menjadi salah satu transformasi ekonomi paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Integrasi teknologi berbasis kecerdasan buatan ke dalam sektor produksi, distribusi, jasa, hingga tata kelola organisasi telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi secara substansial. Namun demikian, transformasi tersebut juga memunculkan tantangan baru berupa meningkatnya ketimpangan akses teknologi, pergeseran struktur pasar kerja, serta risiko pengangguran struktural akibat otomatisasi pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia (Brynjolfsson & McAfee, 2014; Acemoglu & Restrepo, 2018). Dalam konteks ini, kemajuan teknologi tidak selalu menghasilkan distribusi kesejahteraan yang merata.

Perubahan struktur ekonomi akibat AI turut mendorong munculnya bentuk kemiskinan yang lebih kompleks dibandingkan paradigma kemiskinan konvensional. Kemiskinan tidak lagi hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap infrastruktur digital, literasi teknologi, modal ekonomi, dan peluang partisipasi dalam ekonomi berbasis inovasi. Fenomena tersebut dikenal sebagai bentuk baru dari *digital inequality*, yaitu kondisi ketika kelompok masyarakat tertentu tertinggal karena tidak memiliki kemampuan dan sumber daya untuk mengakses manfaat transformasi digital (van Dijk, 2020). Laporan dari World Bank (2016) juga menunjukkan bahwa manfaat ekonomi digital cenderung terkonsentrasi pada kelompok yang telah memiliki modal pendidikan dan akses teknologi yang memadai.

Di sisi lain, perkembangan AI menghadirkan paradoks pembangunan ekonomi modern. Teknologi mampu meningkatkan efisiensi produksi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama dapat memperlebar konsentrasi kepemilikan modal dan meningkatkan ketergantungan terhadap korporasi digital berskala besar. Dalam kerangka ekonomi politik kontemporer, kondisi tersebut sering dipahami sebagai manifestasi baru dari *digital capitalism*, yaitu struktur ekonomi yang menempatkan data, algoritma, dan teknologi sebagai sumber akumulasi kekayaan utama (Schwab, 2016; Srnicek, 2017). Akibatnya, kelompok masyarakat berpendapatan rendah berisiko semakin sulit memasuki pasar ekonomi digital secara kompetitif.

Dalam situasi tersebut, diperlukan pendekatan ekonomi alternatif yang tidak semata berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga menempatkan aspek keadilan distributif, pemberdayaan sosial, dan keberlanjutan lingkungan sebagai tujuan pembangunan. Salah satu gagasan yang berkembang dalam diskursus ekonomi alternatif adalah konsep *Three Zeros* yang diperkenalkan oleh Muhammad Yunus melalui tiga agenda utama, yaitu *Zero Poverty*, *Zero Unemployment*, dan *Zero Net Carbon Emissions* (Yunus, 2017). Melalui konsep tersebut, Yunus menawarkan paradigma *social business*, yakni model usaha yang dibangun untuk menyelesaikan persoalan sosial dengan tetap menjaga keberlanjutan ekonomi tanpa menjadikan akumulasi keuntungan sebagai tujuan utama.

Gagasan Three Zeros memperoleh perhatian karena menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa model bisnis sosial memiliki kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan akses pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, dan penciptaan nilai sosial yang lebih inklusif (Yunus et al., 2010; Santos, 2012). Namun demikian, sebagian besar penelitian masih menempatkan konsep Three Zeros dalam konteks bisnis sosial dan pembangunan ekonomi secara umum, sementara kajian yang menghubungkannya dengan tantangan kemiskinan pada era AI masih relatif terbatas.

Dalam perspektif ekonomi Islam, agenda Three Zeros memiliki kedekatan konseptual dengan prinsip keadilan distributif (al-'adl), Jihad Ikhtisadi, dan Khilafah-Amanah. Prinsip tersebut menempatkan aktivitas ekonomi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan (Chapra, 2000). Selain itu, ekonomi Islam juga menyediakan perangkat kelembagaan yang dapat mendukung implementasi tujuan tersebut melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF) dan pembiayaan mikro syariah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (Obaidullah & Khan, 2008).

Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan konsep Three Zeros dengan instrumen ekonomi Islam dalam menjawab tantangan kemiskinan di era *Artificial Intelligence*. Sebagian penelitian membahas transformasi digital dan ekonomi Islam secara terpisah, sementara kajian yang menjembatani dimensi teknologi, bisnis sosial, dan keuangan sosial Islam masih belum berkembang secara memadai. Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep Three Zeros Muhammad Yunus terhadap pengentasan kemiskinan di era *Artificial Intelligence* melalui perspektif ekonomi Islam. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana integrasi antara *social business*, *ZISWAF digital*, dan pembiayaan mikro syariah dapat membentuk kerangka pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi disrupsi teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer sekaligus memperluas diskursus mengenai strategi pengentasan kemiskinan yang lebih relevan dengan dinamika transformasi digital global.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Konsep Three Zeros sebagai Paradigma Pembangunan Baru**

Konsep *Three Zeros* diperkenalkan oleh Muhammad Yunus melalui bukunya *A World of Three Zeros* yang menawarkan paradigma pembangunan baru berbasis *Zero Poverty*, *Zero Unemployment*, dan *Zero Net Carbon Emissions*. Berbeda dengan paradigma pembangunan konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, Three Zeros menempatkan kesejahteraan sosial, penciptaan kesempatan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan sebagai tujuan utama pembangunan. Yunus (2017) berpendapat bahwa kemiskinan bukanlah kondisi alamiah manusia, melainkan akibat dari desain sistem ekonomi yang belum mampu memberikan akses yang adil

terhadap sumber daya produktif. Oleh karena itu, solusi terhadap kemiskinan harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan kesempatan usaha, penguatan kapasitas individu, dan pembangunan sistem ekonomi yang inklusif. Konsep tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam kajian kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dan pembangunan berkelanjutan. Yunus et al. (2010) menjelaskan bahwa *social business* merupakan instrumen utama dalam mewujudkan *Three Zeros* karena mengintegrasikan tujuan ekonomi dan sosial tanpa mengutamakan maksimalisasi keuntungan. Model bisnis ini memungkinkan keuntungan usaha diputar kembali untuk memperluas manfaat sosial sehingga menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **Artificial Intelligence dan Transformasi Kemiskinan**

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah mengubah struktur ekonomi global melalui otomatisasi pekerjaan, peningkatan produktivitas, dan transformasi model bisnis. Schwab (2016) menyatakan bahwa Revolusi Industri Keempat ditandai oleh integrasi AI, Internet of Things, big data, dan teknologi digital yang mengubah hampir seluruh sektor ekonomi. Perubahan tersebut menciptakan peluang baru, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa pergeseran struktur pasar kerja dan meningkatnya ketimpangan digital. Brynjolfsson dan McAfee (2014) menjelaskan bahwa AI mampu meningkatkan efisiensi ekonomi secara signifikan, namun manfaat tersebut tidak selalu terdistribusi secara merata. Kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi, pendidikan, dan keterampilan digital cenderung mengalami risiko eksklusi ekonomi. Hal ini sejalan dengan konsep *digital inequality* yang dikemukakan oleh Van Dijk (2020), yaitu bahwa kesenjangan ekonomi pada era digital tidak lagi hanya dipengaruhi oleh kepemilikan aset ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan mengakses, memanfaatkan, dan mengembangkan teknologi digital. Acemoglu dan Restrepo (2018) menunjukkan bahwa otomatisasi berbasis AI tidak hanya menggantikan pekerjaan rutin, tetapi juga mengubah komposisi permintaan tenaga kerja menuju pekerjaan dengan tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan pada era AI memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses terhadap teknologi, dan penciptaan peluang ekonomi baru.

### **Perspektif Ekonomi Islam terhadap Pengentasan Kemiskinan**

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dan mewujudkan keadilan distributif. Chapra (2000) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan, perlindungan kelompok rentan, dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF), serta pembiayaan mikro syariah memiliki fungsi strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Obaidullah dan

Khan (2008) menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro syariah mampu mengurangi kemiskinan melalui penyediaan pembiayaan produktif yang disertai pendampingan usaha. Selain memberikan akses modal, pendekatan tersebut juga mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat sehingga lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan konsumtif. Perkembangan teknologi digital turut memperluas efektivitas instrumen ekonomi Islam. Digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf memungkinkan peningkatan transparansi, efisiensi penghimpunan dana, serta perluasan jangkauan penerima manfaat. Oleh karena itu, integrasi ekonomi Islam dengan transformasi digital menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi tantangan kemiskinan pada era AI.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat konseptual dan deskriptif-kritis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan statistik antarvariabel, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan merekonstruksi relevansi konsep Three Zeros Muhammad Yunus dalam menjawab tantangan kemiskinan pada era *Artificial Intelligence* (AI) melalui perspektif ekonomi Islam. Penelitian konseptual digunakan untuk membangun sintesis teoritis dari berbagai gagasan yang berasal dari literatur akademik sehingga menghasilkan kerangka analisis yang lebih integratif (Jaakkola, 2020). Dalam konteks penelitian ini, sintesis dilakukan dengan menghubungkan teori bisnis sosial Muhammad Yunus, transformasi ekonomi berbasis AI, serta instrumen ekonomi Islam.

Desain penelitian yang digunakan adalah *conceptual qualitative study* dengan pendekatan *critical literature review*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perkembangan konsep Three Zeros; mengevaluasi tantangan kemiskinan pada era AI; menelaah kesesuaian konsep tersebut dengan prinsip ekonomi Islam; dan menyusun model konseptual integrasi antara bisnis sosial dan keuangan sosial Islam. Metode ini dipilih karena penelitian berupaya menghasilkan rekonstruksi konseptual, bukan melakukan pengukuran empiris lapangan.

Data penelitian sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui dokumen akademik. Sumber data dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari karya utama yang menjadi dasar analisis, yaitu:

1. Yunus, M. (2017). *A World of Three Zeros: The New Economics of Zero Poverty, Zero Unemployment, and Zero Net Carbon Emissions*.
2. Yunus, M., Moingeon, B., & Lehmann-Ortega, L. (2010). *Building Social Business Models*.

Data primer digunakan untuk memahami konstruksi filosofis dan operasional konsep Three Zeros. Kedua, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal internasional, buku akademik, laporan institusi global, publikasi ekonomi Islam, kajian mengenai AI dan transformasi digital. Sumber sekunder diprioritaskan dari basis data Scopus, Google Scholar, ScienceDirect, SpringerLink, World Bank Publications dan Islamic Development Bank. Literatur dibatasi pada publikasi tahun 2010–2026, kecuali

literatur klasik yang memiliki relevansi teoritis tinggi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi literatur. Adapun tahapan pengumpulan terdiri atas:

**Tabel 1. Tahapan Pengumpulan**

Tahap	Aktivitas
<i>Identification</i>	Penelusuran literatur menggunakan kata kunci
<i>Screening</i>	Seleksi relevansi judul dan abstrak
<i>Eligibility</i>	Evaluasi isi dan kesesuaian topik
<i>Inclusion</i>	Penetapan dokumen yang dianalisis

Kata kunci yang digunakan adalah “*Three Zeros*”, “*Muhammad Yunus*”, “*Artificial Intelligence and Poverty*”, “*Islamic Economics*”, “*Islamic Social Finance*”, “*Digital Zakat*” dan “*Sharia Microfinance*”. Literatur yang dipilih harus memenuhi kriteria:

**Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi**

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Membahas AI, kemiskinan, ekonomi Islam, atau <i>Three Zeros</i>	Artikel populer non akademik
Dipublikasikan pada jurnal atau penerbit akademik	Opini tanpa dasar ilmiah
Tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris	Dokumen tanpa identitas publikasi

Analisis data dilakukan menggunakan *qualitative content analysis* yang dikembangkan melalui tahapan interpretatif (Krippendorff, 2018). Tahapan analisis meliputi *Data Reduction* yaitu literatur diseleksi berdasarkan relevansi terhadap tema utama penelitian. *Data Coding* yaitu informasi penting diklasifikasikan ke dalam tema *Zero Poverty*, *Zero Unemployment*, *Zero Net Carbon Emissions*, *AI disruption* dan *Islamic social finance*. *Data Display* yaitu hasil pengelompokan disusun dalam bentuk narasi analitis dan hubungan antarkonsep. *Interpretation and Synthesis* yaitu peneliti melakukan interpretasi kritis terhadap kesesuaian antara konsep *Three Zeros* dan prinsip ekonomi Islam. *Conceptual Reconstruction* yaitu tahap akhir dilakukan dengan membangun model konseptual yang menjelaskan hubungan antara AI, bisnis sosial, ZISWAF digital, dan pembiayaan mikro syariah. Untuk menjaga validitas hasil kajian, penelitian menggunakan triangulasi sumber literatur melalui perbandingan antarartikel, pemeriksaan konsistensi teori dan evaluasi silang antara literatur ekonomi modern dan ekonomi Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil telaah konseptual terhadap literatur mengenai *Three Zeros* Muhammad Yunus, transformasi ekonomi berbasis *Artificial Intelligence* (AI), serta instrumen ekonomi Islam, penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan konseptual yang kuat antara agenda pembangunan sosial Muhammad Yunus dengan mekanisme ekonomi Islam dalam menghadapi kemiskinan pada era digital. Temuan penelitian diklasifikasikan menjadi empat bagian utama.

***Three Zeros* sebagai Kerangka Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Era *Artificial Intelligence***

Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan *Artificial Intelligence* telah menggeser karakteristik kemiskinan dari persoalan kekurangan pendapatan menuju persoalan ketimpangan akses terhadap teknologi dan kesempatan ekonomi. Literatur menunjukkan bahwa transformasi digital memang meningkatkan produktivitas ekonomi secara agregat, tetapi distribusi manfaatnya cenderung tidak merata. Acemoglu dan Restrepo (2018) menjelaskan bahwa otomatisasi berpotensi menurunkan permintaan terhadap pekerjaan rutin sehingga memperbesar risiko pengangguran struktural. Sementara itu, laporan World Bank (2016) menunjukkan bahwa manfaat ekonomi digital lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang telah memiliki modal pendidikan dan akses teknologi. Dalam konteks tersebut, kemiskinan berkembang menjadi fenomena multidimensi yang mencakup keterbatasan akses digital, rendahnya kemampuan teknologi, keterbatasan pembiayaan produktif dan eksklusi ekonomi.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan pengentasan kemiskinan berbasis bantuan konsumtif tidak lagi memadai. Konsep *Three Zeros* yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus (2017) memberikan alternatif melalui pembangunan ekonomi yang menekankan penciptaan kesempatan produktif dan distribusi manfaat ekonomi. Pendekatan ini memandang manusia sebagai pencipta nilai ekonomi, bukan semata tenaga kerja pasif. Dengan demikian, temuan pertama menunjukkan bahwa *Three Zeros* relevan sebagai kerangka normatif untuk merespons transformasi kemiskinan pada era AI.

### **Integrasi Zero Poverty dengan Instrumen Keuangan Sosial Islam**

Temuan kedua menunjukkan bahwa agenda *Zero Poverty* memiliki kesesuaian substantif dengan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pengentasan kemiskinan dipandang sebagai bagian dari pencapaian *maqashid al-shariah*, terutama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat (*hifz al-mal*) dan keberlanjutan sosial (Chapra, 2000). Literatur ekonomi Islam menunjukkan bahwa instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki fungsi redistributif yang tidak hanya mengurangi kemiskinan jangka pendek tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi jangka panjang (Obaidullah & Khan, 2008). Dalam konteks ekonomi digital, berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi tata kelola zakat berpotensi meningkatkan efisiensi distribusi dan memperluas jangkauan penerima manfaat. Studi oleh Ascarya dan Yumanita (2005) menjelaskan bahwa instrumen keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat pembiayaan produktif masyarakat. Sementara itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan sosial Islam (Rahmawati & Yazid, 2025). Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa integrasi *social business* dengan *ZISWAF digital* berpotensi membentuk model pengentasan kemiskinan yang lebih adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi.

Muhammad Yunus menawarkan konsep *Social Business* sebagai instrumen utama untuk mencapai target *Zero Poverty* sebagai antitesis dari korporasi kapitalistik dalam bukunya yang berjudul "*A World of Three Zeros (2017)*". Konsep ini menegaskan

bahwa entitas usaha yang dirancang murni untuk menyelesaikan masalah sosial, termasuk kemiskinan, di mana seluruh keuntungan yang dihasilkan tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemilik modal, melainkan diinvestasikan kembali secara penuh untuk memperluas dampak masalah bagi komunitas marjinal. Di era modern, realisasi *Zero Poverty* melalui bisnis sosial dapat dimaksimalkan dengan mengintegrasikannya bersama instrumen keuangan sosial Islam kontemporer, yaitu optimalisasi Ziswaf digital. Dengan pemanfaatan platform digital oleh LAZ terbukti mampu melakukan *predictive profiling* dan pemetaan kluster kemiskinan secara presisi. Dana Tekno-Ziswaf harus ditransformasikan menjadi modal produktif melalui akad *Qardhul Hasan* atau wakaf produktif untuk menginisiasi unit-unit bisnis sosial (*Grameen Model*) yang kepemilikan saham kolektifnya dipegang oleh para mustahik itu sendiri (Fathoni et al., 2025). Hal ini menciptakan sebuah ekosistem ekonomi sirkular, AI digunakan untuk efisiensi pemetaan dan pengumpulan dana, sementara bisnis sosial bertindak sebagai wadah pemberdayaan riil dilapangan.

### **Rekonstruksi *Zero Unemployment* melalui Pembiayaan Mikro Syariah**

Temuan ketiga menunjukkan bahwa tantangan terbesar era AI bukan sekadar hilangnya pekerjaan, tetapi perubahan struktur pasar tenaga kerja. Menurut Brynjolfsson dan McAfee (2014), transformasi digital menggeser kebutuhan tenaga kerja menuju keterampilan kreatif, adaptif, dan berbasis teknologi. Muhammad Yunus (2017) memandang kondisi tersebut sebagai peluang untuk mengubah masyarakat dari *job seekers* menjadi *job creators*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep Jihad Ikhtisadi dalam ekonomi Islam. Konsep tersebut menempatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi sebagai bentuk perjuangan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks implementasi, pembiayaan mikro syariah menjadi instrumen yang paling relevan. Menurut Obaidullah dan Khan (2008), model pembiayaan mikro syariah memungkinkan masyarakat memperoleh akses modal dengan mekanisme kemitraan dan pembagian risiko. Chowdhury (2025) memberikan evaluasi kritis bahwa transformasi digital saat itu justru membawa kontradiksi besar di lapangan.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Hartono et al. (2026) yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah tetap memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM di tengah transformasi digital. Berdasarkan hasil sintesis, penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan mikro syariah dapat berfungsi sebagai katalis transformasi dari masyarakat pencari kerja menuju masyarakat pencipta kerja.

### ***Zero Net Carbon Emissions* dan Penguatan Prinsip Khilafah Amanah**

Temuan keempat menunjukkan bahwa agenda lingkungan dalam konsep Three Zeros memiliki kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Menurut Yunus (2017), keberlanjutan lingkungan merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi. Namun demikian, literatur menunjukkan bahwa ekonomi digital juga menghasilkan tekanan ekologis baru. Menurut IEA (2024), peningkatan penggunaan pusat data dan infrastruktur AI menyebabkan peningkatan konsumsi energi global. Di sisi lain, *United Nations Environment Programme* (2024) menunjukkan bahwa limbah elektronik terus meningkat secara global. Dalam perspektif ekonomi Islam, manusia diposisikan

sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam (Chapra, 2000). Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian menemukan bahwa implementasi *Zero Net Carbon Emissions* memerlukan integrasi antara teknologi rendah karbon, tata kelola keuangan berkelanjutan dan instrumen ekonomi Islam. adanya dualisme paradoksikal yang sangat tajam ketika agenda emisi nol bersih ini dihadapkan pada realitas ekosistem digital saat ini. Di satu sisi, teknologi digital menyediakan instrumen kuat untuk dekarbonisasi melalui pemanfaatan *big data*, pencitraan satelit, dan model iklim berbasis AI untuk mitigasi bencana, serta penggunaan IoT dan *smart grids* untuk efisiensi energi terbarukan. Namun di sisi lain, infrastruktur digital berkontribusi signifikan terhadap krisis iklim; pusat data (*data centres*) dan *cloud computing* diproyeksikan mengonsumsi hingga 8% energi global pada 2030, aktivitas penambangan *cryptocurrency* menghasilkan emisi setara negara ukuran menengah, serta pesatnya proliferasi perangkat digital memicu lonjakan sampah elektronik (*e-waste*) yang menumpuk di negara-negara berkembang.

### **Pembahasan**

#### **Reinterpretasi Kemiskinan di Era *Artificial Intelligence***

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kemiskinan pada era AI mengalami transformasi dari persoalan keterbatasan pendapatan menjadi persoalan keterbatasan akses terhadap teknologi, modal, dan kapasitas adaptif. Interpretasi ini sejalan dengan teori *digital inequality* yang menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi modern semakin dipengaruhi oleh distribusi akses terhadap sumber daya digital (van Dijk, 2020). Dengan kata lain, teknologi tidak secara otomatis menciptakan kesejahteraan.

Temuan ini juga memperluas argumentasi World Bank (2016) yang menyatakan bahwa manfaat digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan institusi dan kapasitas masyarakat. Dalam konteks tersebut, konsep *Zero Poverty* menjadi relevan karena menawarkan pendekatan yang tidak berhenti pada redistribusi pendapatan tetapi menekankan pembangunan kapasitas ekonomi. Interpretasi ini memperkuat argumen Yunus (2017) bahwa kemiskinan bukan kondisi alamiah manusia, melainkan konsekuensi dari desain sistem ekonomi. Akan tetapi, penelitian ini memperluas gagasan Yunus dengan menunjukkan bahwa pada era AI, kemiskinan juga diproduksi melalui mekanisme eksklusif digital. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat sosial tetapi juga berbasis transformasi teknologi.

#### **Integrasi *Social Business* dan Ekonomi Islam sebagai Model Pemberdayaan Baru**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep *social business* memiliki kompatibilitas dengan prinsip ekonomi Islam. Secara teoritis, keduanya menolak orientasi ekonomi yang semata berpusat pada akumulasi keuntungan dan menempatkan kemaslahatan sosial sebagai tujuan utama. Temuan ini konsisten dengan penelitian Yunus, Moingeon, dan Lehmann-Ortega (2010) yang menjelaskan bahwa model bisnis sosial memungkinkan terciptanya nilai ekonomi sekaligus nilai sosial. Dalam ekonomi Islam, orientasi tersebut sejalan dengan prinsip *maqashid al-shariah*, terutama perlindungan kesejahteraan dan distribusi yang adil (Chapra, 2000). Interpretasi ini menunjukkan bahwa integrasi *social business*, ZISWAF, pembiayaan

mikro syariah dapat dipahami sebagai mekanisme transisi dari ekonomi berbasis bantuan menuju ekonomi berbasis pemberdayaan.

Hal tersebut memperluas penelitian Obaidullah dan Khan (2008) yang sebelumnya lebih berfokus pada fungsi mikrofinansial ekonomi Islam. Dalam konteks era AI, integrasi tersebut memberikan dimensi baru berupa kemampuan memanfaatkan teknologi untuk memperluas inklusi ekonomi. Namun demikian, implementasi model ini tetap memerlukan reformasi tata kelola agar digitalisasi tidak menghasilkan bentuk baru eksklusi sosial.

### **Pembiayaan Mikro Syariah sebagai Mekanisme Adaptasi terhadap Disrupsi Pasar Kerja**

Salah satu temuan penting penelitian adalah bahwa tantangan utama AI bukan sekadar hilangnya pekerjaan, tetapi perubahan struktur pasar kerja. Interpretasi ini mendukung argumentasi Acemoglu dan Restrepo (2018) yang menjelaskan bahwa otomatisasi menciptakan redistribusi permintaan tenaga kerja menuju pekerjaan dengan tingkat kompleksitas lebih tinggi. Dalam kondisi tersebut, strategi pembangunan ekonomi tidak dapat hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja formal. Konsep *Zero Unemployment* yang dikembangkan Yunus (2017) menawarkan perubahan paradigma dari masyarakat pencari kerja menuju masyarakat pencipta kerja. Dalam perspektif ekonomi Islam, perubahan ini memiliki kedekatan dengan konsep Jihad Ikhtisadi, yaitu upaya produktif untuk menciptakan kemandirian ekonomi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dapat memainkan peran strategis dalam menyediakan pembiayaan produktif, pendampingan usaha dan penguatan literasi digital. Interpretasi tersebut memperluas penelitian Hartono et al. (2026) yang menekankan fungsi pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah tidak hanya menjadi instrumen distribusi modal, tetapi juga sarana transformasi kapasitas ekonomi masyarakat.

### **Keberlanjutan Lingkungan sebagai Dimensi Baru Pengentasan Kemiskinan**

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kemiskinan dan krisis lingkungan tidak dapat dipisahkan. Interpretasi ini memperkuat argumentasi *United Nations Environment Programme* (2024) yang menjelaskan bahwa perubahan iklim memberikan dampak paling besar kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Konsep *Zero Net Carbon Emissions* memperluas definisi pembangunan ekonomi menjadi pembangunan yang mempertimbangkan keberlanjutan ekologis. Perspektif tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip Khilafah Amanah dalam ekonomi Islam. Menurut Chapra (2000), manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keberlanjutan bumi sebagai bagian dari aktivitas ekonomi. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi agenda lingkungan pada era AI menghadapi paradoks baru. Teknologi digital memang dapat membantu efisiensi energi dan mitigasi perubahan iklim, tetapi pada saat yang sama meningkatkan konsumsi energi melalui pusat data dan infrastruktur digital.

Temuan ini mendukung laporan IEA (2024) mengenai meningkatnya kebutuhan energi global akibat transformasi digital. Karena itu, pembangunan ekonomi masa

depan memerlukan integrasi antara inovasi teknologi dan tata kelola etis. Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini menghasilkan tiga kontribusi utama. Pertama, memperluas penerapan teori *Three Zeros* dari konteks bisnis sosial menuju konteks transformasi digital. Kedua, menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam dapat berfungsi sebagai mekanisme implementasi dari tujuan *Three Zeros*. Ketiga, menawarkan kerangka integratif antara *AI, social business, ZISWAF* dan *microfinance syariah* sebagai pendekatan alternatif pengentasan kemiskinan.

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *Three Zeros* yang terdiri atas *Zero Poverty, Zero Unemployment, dan Zero Net Carbon Emissions* masih memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan pembangunan ekonomi kontemporer. Konsep tersebut menawarkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pemerataan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, penciptaan kesempatan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam perspektif ekonomi Islam, penelitian ini menemukan adanya kesesuaian konseptual antara tujuan *Three Zeros* dengan prinsip keadilan distributif, maqashid al-shariah, Khilafah–Amanah, serta Jihad Ikhtisadi. Integrasi antara *social business, ZISWAF digital, dan pembiayaan mikro syariah* dipandang mampu menjadi mekanisme yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat melalui perluasan akses pembiayaan, peningkatan produktivitas, serta penciptaan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah disrupsi teknologi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan pada era AI tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan bantuan konsumtif atau mekanisme pasar semata, melainkan memerlukan model pemberdayaan yang mampu menghubungkan transformasi digital dengan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis nilai. Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam memberikan landasan etis sekaligus instrumen kelembagaan yang dapat memperkuat implementasi tujuan *Three Zeros*.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas diskursus ekonomi Islam melalui integrasi konsep *Three Zeros* ke dalam konteks transformasi ekonomi digital. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah, pengelola ZISWAF, pelaku usaha sosial, dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan ekonomi yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif berbasis library research sehingga belum menguji efektivitas model yang diusulkan secara empiris. Selain itu, penelitian masih berfokus pada pengembangan konseptual dan belum mengevaluasi implementasi operasional pada konteks kelembagaan tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, studi lapangan, atau metode campuran untuk menguji efektivitas integrasi *Three Zeros* dan ekonomi Islam dalam pengentasan kemiskinan di era *Artificial Intelligence*.

## REFERENCES

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). *Artificial intelligence, automation and work*. National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w24196>
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 8(1), 6–43. <https://doi.org/10.21098/bemp.v8i1.127>
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
- Fathoni, H., Riaualdi, I. D. A., Rusdi, M., & Sai'in, A. (2025). Wakaf Produktif di Era Digital : Tinjauan Fikih dan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 103–112. <https://doi.org/10.30595/jhes.v8i2.26387>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Hartono, S., Yunus, F., & Sunarti, G. (2026). Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4747–4758. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3005>
- IEA. (2024). *Electricity 2024*.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Sage.
- Rahmawati, M., & Yazid, M. (2025). Implementasi Ziswaf Dalam Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Prinsip Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha)*, 5(1), 41–52. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v5i1.583>
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Islamic Development Bank.
- Santos, F. M. (2012). A Positive Theory of Social Entrepreneurship. *Journal of Business Ethics*, 111(3), 335–351.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
- Srnicek, N. (2017). *Platform Capitalism*. Polity Press.
- Van Dijk, J. (2020). *The Digital Divide*. Polity Press.
- World Bank. (2016). *World Development Report 2016: Digital Dividends*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0671-1>
- Yunus, M. (2017). *A World of Three Zeros: The New Economics of Zero Poverty, Zero Unemployment, and Zero Net Carbon Emissions*. New York: PublicAffairs. ISBN 9781610397575.
- Yunus, M., Moingeon, B., & Lehmann-Ortega, L. (2010). Building social business models: Lessons from the Grameen experience. *Long Range Planning*, 43(2–3), 308–325. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.12.005>